

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Andi Wahyudi^{1*}, Jaelan Usman², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine how the role of the Social Service in fostering street children in Makassar City and to determine the supporting and inhibiting factors of the city government in handling street children in Makassar City. This study used qualitative research. Data collection techniques were observation, interview and documentation. The research informants in this study were 10 people. The results of the study showed that the aspect of prevention was carried out by patrol activities every day routinely by the Saribattang Rapid Reaction Team (TRC), the advanced coaching aspect was the activity carried out by the Makassar City Social Service for finding out the reason for children taking to the streets by way of identification or assessment in RSPA (Child Social Protection House), and aspects of rehabilitation of street children rehabilitation was the cooperation between the Makassar City Social Office and the Narcotics Abuse Group Foundation (YKP2N).

Keywords: *role of social service, development of street children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah 10 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aspek pembinaan pencegahan dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat dengan (TRC), aspek pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), dan aspek pembinaan rehabilitasi anak jalanan adalah kerja sama Dinas Sosial Kota makasar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba atau biasa di singkat dengan (YKP2N).

Kata kunci: peran dinas sosial, pembinaan anak jalanan

* andiwahyudi@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang sebelumnya di kenal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, namun mengalami perubahan pada era kepemimpinan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga, karena anak mempunyai masa depan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang tidak dapat dikurangi apalagi dilanggar siapapun.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kenyataannya tidak semua anak mendapatkan kebebasan ataupun kebutuhan yang diinginkan serta tidak semua anak merasakan masa-masa indah. Sebab masih ada anak yang berperan ganda, dan pada usia 14 sampai 16 tahun sudah terbebani oleh pekerjaan mencari nafkah yang seharusnya mereka hanya menimba ilmu pengetahuan maupun pendidikan.

Anak yang bekerja dan turun ke jalan terjadi karena faktor-faktor dorongan dari orang tua atau anak itu sendiri memilih untuk hidup di jalanan. Hal ini menimbulkan masalah anak jalanan tidak henti-hentinya menjadi sorotan permasalahan yang tidak ada

ujung pangkalnya (penelitian Wedaratiningsih, 2010).

Lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah (LSM maupun masyarakat) wilayah Kota Makassar perlu lebih memberikan perhatian dan sumber dayanya untuk melindungi anak jalanan, baik dari segi fisik maupun psikis. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak jalanan, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga dan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁴ Hal ini sangat memperhatikan, tentunya fenomena ini tidak terlahir dari faktor tunggal arus modernisasi ada hal lain yang melatar belakangi sebagai contoh krisis ekonomi yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan perkembangan jumlah anak jalanan dan putus sekolah

yang belakangan ini semakin menggelembung. Seiring perkembangan pesat anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai sudut jalan, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan di sisi yang sama ternyata ada juga yang melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan.

Kuantitas anak jalanan di Indonesia semakin banyak jumlahnya dan secara kualitas makin beragam. Seperti yang dibicarakan oleh Rasiyo 2011 (Sekretaris Daerah Provinsi), sekitar 11 jutaan anak di Provinsi Jawa Timur perlu mendapatkan perlindungan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahwa dari jumlah penduduk di Jawa Timur yang mencapai 37.476.011 jiwa, terdapat sekitar 11 juta jiwa di antaranya sekitar 30 persen adalah anak berusia 0-13 tahun (REPUBLIC.CO.ID, SURABAYA).

Di Kota Makassar keberadaan anak jalanan dapat terlihat di tempat-tempat umum seperti di persimpangan jalan tol reformasi, Jl.A. Pangerang Petta Rani dan Jl. Sultan Awaluddin, persimpangan jalan mesjid raya dan Jl. G.Latimojong, persimpangan Jl. S. Saddang dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Monginsidi dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Landak baru dan Jl. Veteran. Di terminal, tempat pembuangan sampah dan berkeliaran di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Sebagian besar anak jalanan di Kota

Makassar merupakan pendatang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar bahkan ada yang dari luar Sulawesi yakni dari Jawa, Lombok dan Kalimantan. Anak jalanan ini adalah anak-anak dari para pendatang yang mencoba mencari penghidupan lebih baik di Kota Makassar. Data terakhir jumlah anak jalanan di Kota Makassar tahun 2008 sebanyak 876 anak. (penelitian Ronawaty Anasirun, 2011).

Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pemain sandiwaranya sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang

dalam masyarakat yaitu merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. “Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut Linton, peranan ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis, yaitu peran yang ditentukan atau diberikan (*ascribed*) dan peran yang diperjuangkan (*achieved*). Peran yang ditentukan artinya peran-peran yang bukan merupakan hasil prestasi dirinya atau berkat usahanya, melainkan semata-mata karena pemberian orang lain.

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. “Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua,

wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, baik individu maupun kelompok. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya, begitu pula dengan Dinas Sosial Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

Menurut Newell yang dikutip oleh Dadang, menjelaskan bahwa peran adalah sama dengan perilaku dalam kedudukan tertentu dan mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku.

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya". (Musaneff,1991:11).

Menurut Mitha Thoha (2008 : 207) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musaneff dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian

di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah : "Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna". (Musaneff, 1991:11).

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. "Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Jalan AP Pettarani, sekitaran (Fly Over). Adapun pemilihan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan karena di lokasi tersebut dapat dengan mudah dijumpai anak jalanan, usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan baik di jalan raya, mesjid-mesjid, pasar, tempat hiburan,

restoran dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Waktu penelitian dimulai setelah sidang proposal skripsi dilaksanakan dan memakan waktu maksimal 2 bulan untuk proses penelitiannya, karena di dasari dari beberapa faktor, salah satunya dikarenakan sulitnya melakukan pendekatan terhadap pelaku anak jalanan, dan juga karena adanya kendala-kendala lain seperti menunggu waktu yang tepat agar si anak jalanan dapat di data, dan agar si peneliti memperoleh data yang lebih maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara dari kuantifikasi (pengukuran).

Pendekatan kualitatif tidak mencari hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel tetapi untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh teori.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan menyajikan data

dalam bentuk naratif-deskriptif dalam konteks penelitian dari beberapa informan, dengan cara wawancara dan ditunjang dengan berbagai referensi kepustakaan yang membahas informasi yang berkaitan sehingga peneliti dapat meneliti secara lebih mendalam mengenai judul penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar.

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Yaitu berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang beraktifitas dijalanan antara 4-8 jam perhari. Pada dasarnya Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah no.2 tahun 2008 yang termasuk dalam program pembinaan anak jalanan. Pembinaan pencegahan adalah langkah

yang dilakukan demi mengurangi atau mencegah anak turun kejalan.

Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan ini dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Team Reaksi Cepat Saribattang. Team Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat (TRC) Saribattang, adalah tim yang di gagas oleh pemerintah dan dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait penanganan anak jalanan, gepeng dan pengemis di Kota Makassar. Dari segi nama TRC Saribattang dulunya hanya disebut “Patroli Anak Jalanan” kemudian di ubah semenjak tahun 2014 dan dibentuk menjadi TRC Saribattang, dari segi anggotanya pun sudah lebih banyak dari sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 22 orang. Tidak hanya itu, dari segi fasilitas patroli saat ini lebih memadai seperti mobil saribattang yang ada sejak tahun 2015 lalu. Tugas Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang sesuai dengan SK Walikota yaitu melakukan patroli penjangkauan di semua titik lampu merah yang ada di kota Makassar, yang dimuat dalam sebuah kegiatan bernama pembinaan dan patroli anak jalanan tahun anggaran 2019. Dalam melakukan patroli ini peran Satpol PP dan Kepolisian hanya sebagai

pengawal dan penjaga bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika ada di jalan. Sedangkan petugas yang melakukan penjangkauan langsung adalah dari Dinsos.

Dalam program pembinaan anak jalanan memiliki beberapa proses yaitu ketika anak jalanan di razia oleh TRC saribattang maka tim TRC melakukan (1) Pendataan awal seperti identitas anak jalanan, identitas orang tua, alamat, pekerjaan orang tua dan sebagainya, (2) dari hasil pendataan awal, maka TRC saribattang merujuk pada sakti peksos untuk melakukan assesment, (3) dari hasil assesment tersebut, sakti peksos melakukan *home visit* atau peninjauan langsung rumah tempat tinggal anak jalanan agar lebih mengetahui dan mendalami masalah yang dihadapi anak jalanan tersebut. Dari hasil *home visit* tersebut dapat diambil satu tindakan (rujukan) untuk membantu anak jalanan tersebut.

Setelah tim kerja terbentuk Dinas Sosial melakukan upaya selanjutnya yaitu melakukan langkah langkah penanganan anak jalanan yang sudah di rencanakan. Langkah langkah penanganan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu : Penjangkauan (patroli), Identifikasi, *Home visit*, Pelatihan Keterampilan. Penjangkauan (patroli) merupakan langkah pertama yang

dilakukan oleh Dinsos yaitu Team Reaksi Cepat (TRC) Saribattang.

Program Pembinaan Lanjutan

Anak jalanan yang berhasil dirazia oleh TRC Saribattang, akan di assesment di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Namun, tidak jarang juga ada sakti peksos yang ikut patroli guna mempercepat proses program pembinaan pencegahan anak jalanan. Penjangkauan (patroli) langsung dilakukan dilapangan yaitu di tempat-tempat strategis dan pusat keramaian seperti lampu merah atau perempatan jalan, Pantai Losari, Fly Over serta tempat umum lainnya.

Keberadaan anak jalanan kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalulintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar terdapat beberapa titik yang paling rawan anak jalanan yaitu Sungai Saddang, Perbatasan Gowa Makassar, dan Fly Over Urip. Lokasi patroli yang dilakukan TRC Saribattang yaitu lampu merah Kakatua, lampu merah Labuang Baji, Lampumerah Pettarani, Boulevard, Ahmad Yani, Mesjid Raya, Anjungan, Fly OverUrip, Bandara, perbatasan Gowa. Patroli ini dilakukan setiaphari pada jam10 pagi sampai selesai dan jam 3sore sampai selesai.

Titik patroli TRC Saribattang yang jarang didatangi yaitu Bandara dan perbatasan Gowa. Karena titik itu adalah titik yang paling jauh diantara yang lainnya, makanya 2-3 hari baru dilakukan patroli di daerah tersebut. Patroli yang dilakukan TRC Saribattang tidak pernah melewati daerah Fly Over, Boulevard Dan Pantai Losari karena daerah tersebut paling dominan ditemui anak jalanan. Seperti anak jalanan yang menjual-jual di lampu merah Boulevard yang tidak lazim lagi terlihat. Pembinaan lanjutan anak jalanan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dan lebih mengetahui masalah yang terjadi pada anak jalanan. Dalam Pembinaan lanjutan ada beberapa hal yang dilakukan yaitui dentifikasi atau assesment pada anak jalanan dan kemudian melakukan home visit. Anak yang terjaring saat patroli dilakukan akan dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Turikale Dinas Sosial Kota Makassar untuk di identifikasi dan diassesment

RPSA merupakan tempat transit bagi anak jalanan karena setelah didapat, mereka langsung dibawa kesini untuk diassesment setelah itu dapat ditentukan mereka dipulangkan atau bisa jadi dirujuk ke YKP2N untuk direhabilitasi.

Pendekatan yang digunakan dalam menangani anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu Pendekatan Persuasi, Pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.

2) Pendekatan Komunikatif, Bahasa komunikatif adalah bahasa yang biasa digunakan pada wilayah dimana sedang terjadi proses komunikasi, tidak terpaku pada satu bahasa saja, mudah diterima, mudah dipahami dan mudah untuk ditanggapi atau mendapatka feedback. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan bahasa komunikatif sebagai bahasa pengantar dalam membina anak jalanan. Dengan bahasa yang komunikatif maka akan mengurangi rasa kaku, monoton, dan akan lebih menarik bagi komunikan, pada akhirnya diharapkan mampu mencapai tujuan dalam proses pembinaan.

Program Pembinaan Rehabilitasi Anak Jalanan

Dalam melakukan pembinaan rehabilitasi anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Pengguna Narkoba (YKP2N). Anak jalanan yang tidak memiliki masalah atau tidak terindikasi narkoba atau menghisap lem hanya disuruh membuat surat pernyataan agar tidak turun ke jalan lagi. Namun, tidak sedikit juga anak jalanan yang mengalami masalah seperti menghisap lem yang sangat marak terjadi pada anak jalanan.

Anak jalanan yang diassessment dan diketahui menghisap lem, mereka langsung di rujuk ke Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Pengguna Narkoba (YPK2N) di Jalan FaisalXII Makassar yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial. Disana mereka direhabilitasi selama enam bulan. Disana para pecandu mengikuti kegiatan sejak pagi hingga waktu tidur. Diantaranya seminar, shalat, olahraga dan berbagai kegiatan lain yang sifatnya pembinaan agar mereka bisa keluar dari perilaku lama menjadi manusia yang lebih disiplin.

Jika anak jalanan yang terdeteksi menghisap lem atau obat-obatan lainnya seorang perempuan, maka anak tersebut

hanya diberikan motivasi dan dikembalikan kepada keluarganya berhubung belum adanya panti rehabilitasi khusus untuk perempuan.

Dinas Sosial Kota Makassar tidak hanya bekerja sama dengan panti Sosial rehabilitasi YKP2N tetapi bekerja sama pula dengan PSMP Toddopuli. Jika anak jalanan diketahui merupakan anak yang nakal dan mempunyai masalah dengan hukum, maka akan dirujuk ke PSMP Toddopuli di Salodong yang juga berada dibawah naungan Kementerian Sosial. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) merupakan Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai kendala yang di hadapi peneliti dalam melaksanakan observasi di lapangan untuk mendapatkan data informan langsung dari “anak jalanan”. Yaitu :

1) Susahnya melakukan pendekatan komunikasi terhadap anak jalanan yang di sebabkan oleh faktor stigma yang berkembang di lingkungan anak jalanan seperti, “mahasiswa hanya akan melaporkan keberadaan si anak jalanan ke pihak Dinas Sosial atau pihak kepolisian”, sehingga dia merasa takut dan tidak ingin diajak berkomunikasi. Sekalipun peneliti sudah tidak memakai

alamatater universitas tetap saja mereka tidak mau di ajak komunikasi.

2) Adanya intervensi dari orang tua si “Anak Jalanan” yang menghimbau anaknya untuk tidak melakukan komunikasi kepada orang yang tidak di kenal.

3) Sulitnya mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi terhadap anak jalanan di karenakan kebanyakan anak jalanan yang di temukan di jalan, mereka sibuk dengan kegiatannya masing masing.

4) Premanisme, kerasnya kehidupan di jalan membuat anak jalanan cenderung hidup “keras” sehingga mereka membentuk kelompok kelompok sendiri yang cenderung sama dengan mereka, dan melakukan aksi kekerasan seperti halnya pencopetan, pemalakan dll. Hal ini yang membuat peneliti merasa ragu untuk mendekati anak jalanan yang sedang berkumpul dengan teman temannya.

Dari berbagai ulasan di atas maka si peneliti hanya memperoleh sedikit data di lapangan, dan hanya beberapa dokumentasi yang berhasil di ambil.

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan anak jalanan ini adalah keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial yang selama ini digunakan adalah

milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu, sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam membina dan membimbing anak jalanan, sehingga instansi lain turut ikutserta menangani pembinaan anak jalanan tersebut. Maka dari itu mereka belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang tertangkap, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Selama ini alat transportasi tersebut berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan, berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan, pembinaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi

setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terjaring pada penertiban anak jalanan ini ialah kategori anak-anak, remaja, lanjut usia yang beraktifitas di lampu merah. Pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga yang tidak menasehati keluarganya, sehingga terjadilah penyimpangan anak jalanan. Sosialisasi yang diberikan ketika dalam penertiban baik pemberian nasihat, pembinaan mental dan rohani, ternyata sangat sulit karenadengan mengemis di jalanan lebih mudah dalam mendapatkan uang tanpa bersusah payah dan akhirnya setelah dibina selama 3-7hari mereka kembali kejalanan. Sedangkan masalah lainnya adalah, seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada anak jalanan yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari peneliti serta uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

Peran Dinas Sosial itu sendiri dalam pembinaan anak jalanan adalah melakukan penanganan melalui 3 program yaitu : Program pembinaan pencegahan, Program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi anak jalanan. Program pembinaan pencegahan ini dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat dengan (TRC) yang di bentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait anak jalanan di Kota Makassar. Program pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak). Program pembinaan rehabilitasi anak jalanan adalah kerja sama Dinas Sosial Kota makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba atau biasa di singkat dengan (YKP2N), anak jalanan yang di assesment dan diketahui menggunakan narkoba atau mengisap lem dan semacamnya maka mereka langsung di rujuk di YKP2N di Jalan Faisal XII Makassar yang berada di naungan Kementrian Sosial.

Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Kota Makassar berperan sebagai pengganti orang tua, guru, perawat dan pengawas untuk anak jalanan. Dinas Sosial berperan sebagai orang tua anak jalanan bertanggung jawab dan bekerja dengan program rumah singgah untuk menangani anak jalanan yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Dinas Sosial berperan sebagai pengganti guru dalam bidang pendidikan, sebagai perawat untuk bidang kesehatan, dan sebagai pengawas dalam bentuk pendampingan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan programnya, Dinas Sosial Kota Makassar masih menemui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial itu sendiri yaitu: keterbatasan dana, faktor anak jalanan yang bertambah tiap tahunnya, dan kurangnya tempat pusat pembinaan untuk menampung anak jalanan. Adapun faktor pendukung dalam menjalankan programnya ialah: adanya faktor *Political will*, yaitu basis keyakinan

publik atau masyarakat terhadap pemerintah, kemudian adanya lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan, dan terakhir yaitu terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, LSM, serta unsur masyarakat.

Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi F.F., Zulkifly A., Syamsiar S.R. Faktor Risiko Kanker Ovarium di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. 2014.
- Ayuningsih, Diah. (2010). Psikologi Perkembangan Anak. Yogyakarta: Pustaka Larasati.
- Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi. (2000). Pekerja Anak Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanganannya. Surabaya : Lutfiansyah Meditama.
- Bagong Suyanto, 2010. Masalah Sosial Anak. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Barzan. B. (1999). Panti Asuhan sebagai Lingkungan Keluarga. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory : Concept and Research. NewYork : Wiley
- Bukharistyle.blogspot.com :2012 Apa Pengertian Dari Pembinaan
- Cooley (1902) atau Mead (1934), hubungan antara aktor dan target.
- Creswell W. John. 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial R.I. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Irwanto, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi, Jakarta : KPM Unika Atma Jaya. Masduki, 2003. Radio Siaran dan Demokratisasi, Jendela: Yogyakarta.
- Kalida, Muhsin dan Bambang Sukamto. Jejak Kaki Kecil di Jalanan. Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012.
- Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagun.
- Novrizal, Muhammad. 2009. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.